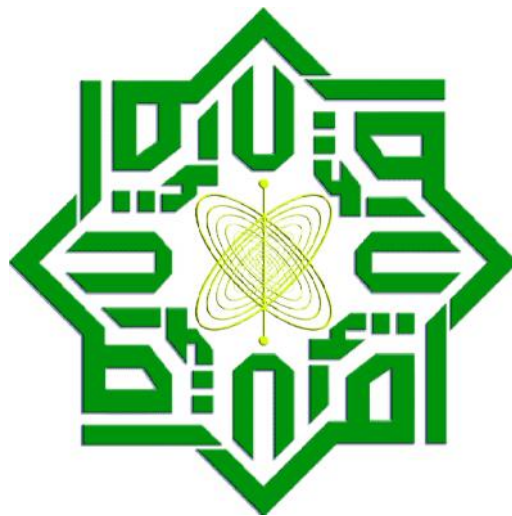


SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Disusun Oleh

NANDA SONEFIL

NIM. 10875004277

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2012**

ABSTRAK

*Skripsi ini berjudul **Analisis Implementasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis**. Penelitian ini dilatar belakangi Kondisi dimana belum maksimalnya Implementasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sehingga masih ditemukanya guru yang sudah lama mengabdikan belum disertifikasi serta peningkatan mutu pendidikan yang belum membaik. Selain itu masih adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sertifikasi kurang baik dan pembagian tugas kurang maksimal dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional no 11 tahun 2011.*

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah mengetahui untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, Kuesioner dan pengamatan langsung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Implementasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri pendidikan nasional dan juga didapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Key words : Pembagian tugas, SDM, Peningkatan Penghasilan, Sarana dan Prasarana, Dan Peningkatan Mutu Pendidikan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur tanpa batas penulis persembahkan kehadiran-Nya yang telah member nikmat Iman, Ihsan dan Islam. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Alam yaitu Baginda Rasulullah SAW yang merupakan Figure sentral umat islam.

Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS”**. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada :

1. Bapak DR Mahendra Romus, SP, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.
2. Bapak Drs.Almasri, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rusdi, MA selaku Sekretaris Jurusan Program S1 Adminitrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
3. Ayahanda Muzni dan Ibunda Bennofel yang selalu mencintai ananda dengan sepenuh hati, serta memberikan Doa dan restu sehingga menjadi motivasi dan kekuatan kepada ananda dalam mengarungi kehidupan ini.

4. Bapak Mashuri, MA selaku Penasehat Akademis dan Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya Dosen Jurusan Administrasi Negara yang tiada henti tularkan nilai- nilai kebijaksanaan.
5. Bapak Riki Hanri Malau, SE, MM. sebagai Pembimbing dan Ibu Mustiqowati Ummul Fitria, M.Si Sebagai Konsultasi yang telah meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Alpizar, M.si selaku Ketua Tim IV, Ibu Sri Selaku Sekretaris Tim IV serta Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. sebagai Penguji I dan Bapak Afrinaldi Rustam Sebagai Penguji II.
7. Bapak H. Herman Sani, SH, MH. dan seluruh stake-cholder Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan informasi kepada penulis.
8. Kakanda Febriani, S.Pd dan Adinda Indah Permata Sari yang selalu senantiasa mengokohkan langkah rintih kami dalam menikmati alur kehidupan.
9. Ibu Muinah dan Keluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian selama penulis berada di Bengkalis.
10. Bagi seseorang Keikhlasanya menjadi asa penebar kesejahteraan.
11. Seluruh saudara-saudaraku, karib kerabat dan semua sahabatku (Adhitya Fernando, Akhmad Ikhwan, Arif Wiyuda, Nurul Ikhsan, M. Ajis, Mardiyulis, Nanang, Wike, Rima, Erni Juliani, Hijatul padma), Adminstrasi Negara Lokal C angkatan 2008, Himpunan Mahasiswa Islam (Kanda Supri, Kanda Handiro, Kanda Bilal, Kanda Nurman, Kanda Febri,

Kanda Pii, Kanda Tata, Kanda Ari, Yunda Else Triana dan Yunda Dila) Khususnya HMI Komisariat Fekonsos (Yunda Ina, Kanda Muammar, Kanda Sutar, Kanda Dedi, Asrofi, Romi, Fandy Alviyanto) Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (IPMKB), Ikatan Mahasiswa Minang Rantau Riau Bersatu (IMAMARU), Ikatan Mahasiswa Kecamatan Mandau, BEM FEKONSOS dan seluruh teman-teman yang tak dapat disebutkan satu-persatu

12. Bagi generasi kemudian yang akan meneruskan estafet penyebaran “*Virus*” Positif dengan pemahaman yang substantif dan bernilai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala dukungan dan bantuan yang telah penulis terima. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 24 Mei 2012

Penulis

NANDA SONEFIL
NIM. 10875004277

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL ix

DARTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Perumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Sistematika Penelitian 8

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1	Kerangka Teori	10
A.	Pengertian Implementasi	10
B.	Faktor Mendukung Implementasi Kebijakan	11
C.	Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	13
D.	Pelaksanaan Tugas.....	14
E.	Sertifikasi.....	15
F.	Dasar Hukum Sertifikasi Guru	16
G.	Penyelenggaraan Sertifikasi	16
H.	Syarat- Syarat Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru	17
I.	Prinsip- Prinsip Sertifikasi Guru	18
2.2	Defenisi Konsep	20
2.3	Konsep Operasional	20
2.4	Hipotesis	21
2.5	Kerangka Pemikiran.....	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Waktu Dan Lokasi Penelitian	26
3.2	Jenis Dan Sumber Data	26
3.3	Populasi Dan Sampel	27
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5	Analisis Data	30

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian.....	31
4.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	33
4.5 Struktur Organisasi Unit Kerja Tempat Penelitian	35
4.5 Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Tempat Penelitian	39
4.6 Uraian Tugas (<i>job description</i>) Bagian/Unit Kerja	
Tempat Penelitian	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	45
5.2 Pembagian Tugas	49
5.3 Sumber Daya Manusia	65
5.4 Peningkatan Penghasilan	72
5.5 Sarana Dan Prasarana.....	78
5.6 Peningkatan Mutu Pendidikan	86
5.6 Hambatan Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Di	
Kabupaten Bengkalis	92

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	94
----------------------	----

6.2 Saran	95
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

BIOGRAFI

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Jumlah Guru PNS Kabupaten Bengkalis Per Tingkat Sekolah Tahun 2011	2
Tabel 1.2	Daftar Indikator dari profesionalitas guru	3
Tabel 1.3	Jumlah Guru Yang Telah Sertifikasi Se- Kabupaten Bengkalis Tahun 2011	5
Tabel 1.4	Perbandingan atau Rasio Jumlah Keseluruhan PNS dan Yang Sudah di Serifikasi Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011	6
Tabel 3.1	Daftar Populasi Dan Sampel pada Penelitian Peranan Sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.....	28
Tabel 4.1	Penduduk Berumur 7-24 Tahun Keatas Yang Masih Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur.....	41
Tabel 5.1	Jumlah Responden Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
Tabel 5.2	Jumlah Responden Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Umur	47
Tabel 5.3	Jumlah Responden Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 5.4	Jumlah Responden Pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Lama Bekerja.....	48
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pengumpulan Portofolio Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Bengkalis	49
Tabel 5.6	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengumpulan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis	50
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang tindak lanjut Guru Dalam Jabatan yang tidak Mendaftarkan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis	51

Tabel 5.8	Distribusi Frekuensi tanggapan responden tentang kegiatan pengumpulan portofolio mengenai sertifikasi guru di kabupaten Bengkulu	52
Tabel 5.9	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Prosedur Yang Diterapkan oleh Pemerintah Dalam Hal Pengumpulan Portofolio di Kabupaten Bengkulu	53
Tabel 5.10	Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Pengumpulan Portofolio.....	54
Tabel 5.11	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Dinas Pendidikan telah membuat penilaian portofolio di Kabupaten Bengkulu	55
Tabel 5.12	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penilaian Portofolio Apakah Sudah Dilakukan Dengan Baik Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkulu	56
Tabel 5.13	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penilaian Portofolio yang Dibuat Tesebut Berdasarkan Keadaan yang Terjadi Dilapangan dan Apakah Sudah Disusun dengan Baik di Kabupaten Bengkulu	57
Tabel 5.14	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Para Guru Dalam Jabatan yang tidak Lulus Dalam Penilaian Portofolio, apakah Sudah Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkulu	58
Tabel 5.15	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penilaian Portofolio yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu sudah sesuai dengan kemampuan guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkulu	59
Tabel 5.16	Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Penilaian Portofolio.....	60
Tabel 5. 17	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Verifikasi Portofolio dalam Sertifikasi Guru Dilakukan Panitia Pelaksana yang Berwenang Terhadap Setiap Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Bengkulu	61
Tabel 5.18	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang prosedur dalam verifikasi portofolio yang dilakukan panitia di Kabupaten Bengkulu bagaimana melakukan pekerjaan tersebut	52
Tabel 5.19	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang System Dan Prosedur yang Ditetapan Oleh Pemerintah Dalam Hal Verifikasi Portofolio di Kabupaten Bengkulu.....	63

Tabel 5.20	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Hambatan yang Dialami Oleh Petugas Pelaksana Pada Verifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis	63
Tabel 5.21	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Peraturan Verifikasi Guru Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis	64
Tabel 5.22	Rekapitulasi Penilaian Responden Tentang Sertifikasi Guru	65
Tabel 5.23	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Petugas Pelaksana Sertifikasi Guru Dalam Pemberian Pelayanan di Kabupaten Bengkalis	67
Tabel 5.24	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Latar Belakang Pendidikan dan Skill Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis	68
Tabel 5.25	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Proses Perekrutan Para Panitia Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis	68
Tabel 5.26	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Para Petugas Pelaksana Sertifikasi Menguasai Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis	69
Tabel 5.27	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Kinerja Para Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis	70
Tabel 5.28	Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Kualitas Kerja (sumber daya manusia)	71
Tabel 5.29	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penghasilan Guru Dalam Jabatan Yang Sudah Di Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis	72
Tabel 5.30	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pemerintah Sudah Tepat Waktu Dalam Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis	73
Tabel 5.31	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pemerintah Sudah Melakukan Pembayaran Penghasilan Sertifikasi Guru Dengan Baik Sesuai Dengan Jumlah Atau Tarif di Kabupaten Bengkalis	74

Tabel 5.32	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Guru yang Sudah Disertifikasi, Apakah Mereka Merasa Sudah Puas Dengan Penghasilan Sertifikasi yang Ditetapkan Pemerintah di Kabupaten Bengkulu	75
Tabel 5.33	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penundaan Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkulu	76
Tabel 5.34	Rekapitulasi Penilaian responden tentang Peningkatan Penghasilan di Kabupaten Bengkulu	77
Tabel 5.35	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu telah memberikan Sarana dan prasarana dalam penerimaan sertifikasi guru Kabupaten Bengkulu	79
Tabel 5.36	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Sarana Dan Prasarana Apakah Sudah Tersedia Dengan Baik Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkulu	80
Tabel 5.37	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang sarana dan prasarana yang disediakan tersebut sesuai kebutuhan di Kabupaten Bengkulu	81
Tabel 5.38	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Sarana Dan Prasarana yang tidak Baik, Apakah Sudah Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkulu.....	82
Tabel 5.39	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkulu	82
Tabel 5.40	Rekapitulasi Penilaian responden tentang Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bengkulu.....	83
Tabel 5.41	Jumlah Dan Kondisi Sarana dan Prasarana Panitia Sertifikasi Guru Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.....	85
Tabel 5.42	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang program sertifikasi guru telah membuat peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkulu.....	86
Tabel 5.43	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang peningkatan mutu pendidikan, apakah sudah dilakukan dengan baik oleh guru yang sudah disertifikasi di Kabupaten Bengkulu.....	87

Tabel 5.44	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang program Sertifikasi guru mampu memberikan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan baik di Kabupaten Bengkalis	88
Tabel 5.45	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang para guru dalam jabatan yang belum disertifikasi, apakah mampu memberikan peningkatan mutu pendidikan dengan baik di Kabupaten Bengkalis.....	89
Tabel 5.46	Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang peningkatan mutu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan kemampuan guru yang di sertifikasi di Kabupaten Bengkalis	90
Tabel 5.47	Rekapitulasi Penilaian responden tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bengkalis	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian pendidikan nasional pada tahun 2007 mulai melaksanakan sertifikasi secara bertahap. Sertifikasi guru-guru merupakan perwujudan UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP tahun 19 tahun 2005 dengan tujuan meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Menurut Yamin (2006: 1) Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan oleh rendahnya input pendidikan, akan tetapi diakibatkan proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru. Proses pendidikan yang tidak maksimal hal ini disebabkan penempatan guru pada mata pelajaran tidak sesuai dengan jurusan profesi diambil.

Didalam agama islam sangat mengatur tentang penempatan dalam bekerja seperti Rasullulah SAW pernah bersabda (Yamin, 2006 : 6) bahwa suatu pekerjaan yang diserahkan kepada seseorang bukan profesinya, maka tunggulah suatu kehancuran (HR Bukhari).

Dengan ditetapkan guru sebagai jabatan professional maka guru dituntut memiliki kompetensi tertentu yang terukur dan teruji melalui prosedur tertentu. Dalam Undang- undang no 14 tahun 2005 dinyatakan bahwa sebagai pendidik professional guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sementara itu professional dimaknai sebagai pekerjaan atau kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Tabel 1.1: Daftar Jumlah Guru PNS Kabupaten Bengkalis Per Tingkat Sekolah Tahun 2011

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah
1	TK	74
2	SD	2610
3	SMP	890
4	SLB	0
5	SMA	589
6	SMK	106
Total		4269 orang

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

Sebagaimana yang tertera dalam table 1.1 Daftar jumlah guru PNS per Tingkat sekolah tahun 2011 menunjukkan jumlah PNS di Kabupaten Bengkalis 4269 orang yang terbagi atas tingkatan sekolah mulai dari TK berjumlah 74 orang, SD berjumlah 2610 orang, SMP berjumlah 890 orang, SLB berjumlah 0 orang, SMA berjumlah 589 orang dan tingkat sekolah SMK berjumlah 106 orang. Dari hal diatas menunjukkan angka jumlah guru yang professional cukup baik untuk di Kabupaten Bengkalis.

Dalam undang- undang no 14 tahun 2005 Guru sebagai jabatan profesional yang ikut membentuk pribadi manusia dalam proses pertumbuhan yang sangat penting itu, merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

3. Memiliki klasifikasi akademis dan latar belakang sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan tugas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
7. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam tugas keprofesionalan.
8. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Prinsip-prinsip profesionalitas tersebut menunjukkan bahwa guru sebagai jabatan profesional hanya bisa dilaksanakan dengan baik oleh orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Dari sisi yang lain bagi siapapun termasuk para guru itu sendiri, apabila ingin menjadi guru yang profesional dituntut untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi agar bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Tabel 1.2 : Daftar Indikator dari profesionalitas guru

No	Indikator dari profesionalitas guru
1	Guru memiliki bahan ajar
2	Guru mempunyai kreatifitas dalam pembelajaran
3	Guru melaksanakan media dan sumber belajar
4	Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran
5	Guru mampu melakukan penelitian kelas
6	Guru mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif

Sumber : Undang- Undang No 14 Tahun 2005

Dari tabel 1.2 diatas membuktikan peningkatan karier seorang guru yang profesional atau sangat berkaitan dengan kompetensi dan prestasi kerjanya. Dengan demikian maka kenaikan jenjang jabatan dan pangkat merupakan buah dari bertambahnya kompetensi dan prestasi kerja yang ditunjukan dalam suatu kurun atau periode tertentu.

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 11 tahun 2011 ditetapkan oleh pemerintah bahwa tidak semua guru dengan serta merta mengikuti sertifikasi. Dengan kata lain bahwa sertifikasi guru akan dilakukan bertahap tergantung pada institusi pendidikan nasional, Depertemen agama dan Depertemen lain yang menanungi lembaga pendidikan dibawahnya. Guru mengikuti pelaksanaan sertifikasi harus memenuhi syarat peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pengakuan kedudukan guru tenaga professional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan

1. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian ssertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan.

2. Sertifikasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah di miliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma Empat (D-IV).
3. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terekreditasi dan di tetapkan oleh menteri pendidikan nasional.

Tabel 1.3: Jumlah GuruYang Telah Sertifikasi Se- Kabupaten Bengkalis Tahun 2011

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah
1	TK	6
2	SLB	0
3	SD	488
4	SMP	343
5	SMA/ SMK	328
Total		1165 Orang

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

Dari table 1.3 diatas menunjukkan jumlah guru yang telah sertifikasi se Kabupaten Bengkalis tahun 2011. Untuk tingkatan sekolah TK berjumlah 6 Orang yang telah di sertifikasi, tingkatan sekolah SLB berjumlah 0 orang yang telah di sertifikasi, tingkatan sekolah SD berjumlah 488 orang yang telah di sertifikasi, tingkatan SMP berjumlah 343 orang dan tingkatan sekolah SMA/ SMK berjumlah 328 orang yang telah di sertifikasi. Hal diatas menunjukkan masih terdapatnya guru yang sudah PNS namun belum bersertifikasi.

Tabel 1.4 : Perbandingan atau Rasio Jumlah Keseluruhan PNS dan Yang Sudah di Serifikasi Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah PNS	Jumlah Sertifikasi
1	TK	74	6
2	SLB	0	0
3	SD	2610	488
4	SMP	890	343
5	SMA/ SMK	695	328
Total		4269 Orang	1165 Orang

Sumber : Data yang diolah penulis Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kabupaten bengkalis

Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan Panitia Pelaksana Sertifikasi guru (PSG) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pemberian kuota kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan penetapan peserta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

Sehubungan dengan itu diperlukan penghargaan tugas guru, maka di perlukan sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaan proses sertifikasi guru banyak ditemukan guru yang sudah mengabdikan begitu lama tidak bisa mengikuti sertifikasi disebabkan adanya persyaratan yang mempersulit guru dalam pelaksanaan sertifikasi di dalam peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 11 tahun 2011 pasal 2 ayat 2 bagian 7 dan 8 tentang karya pengembangan Profesi dan keikutsertaan dalam forum ilmiah yang mempersulit guru. Guru ditempatkan dalam mata pelajaran tidak sesuai dengan jurusan. Dalam proses yang tidak sempurna mengakibatkan produk sertifikasi tidak efektif akibat tidak relevannya jurusan guru dengan bidang studi. Ketidakefektifan proses sertifikasi disebabkan masih dijumpainya panitia sertifikasi Guru (PSG) yang tamat SMA sederajat. Selain dari

itu peran Dinas Pendidikan kurang maksimal dikarenakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sertifikasi kurang memadai.

Demikian besar peranan guru dalam menunjang keberhasilan pendidikan anak bangsa sehingga perlunya mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah, berdasarkan latar belakang diatas yang telah di uraikan serta permasalahan yang ditemukan penulis di lapangan. Maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan wawasan dan pikiran bagi penulis dalam hal pelaksanaan sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebagai sumbangsih informasi dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan sertifikasi yang efektif pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis susun ke dalam enam bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan tentang konsep, definisi konsep, konsep operasional/*variable* penelitian, hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian.

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian.

Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab ini menguraikan tentang identitas responden, pengelolaan, implementasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bab VI: Penutup.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian dan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian.

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 2001: 47).

A. Pengertian Implementasi

Menurut Poerwadarminta Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu (2002:327).

Kamus Webster dalam wahab merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Menurut Wahab Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu (2001 : 67).

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2001 : 65), menyatakan bahwa :
Proses implementasi adalah *“those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya ujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Implementasi kebijakan Menurut Sunggono (2001: 137) merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

B. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Winarno bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gun, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut Winarno Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (2002 : 126-151).

C. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan menurut Sunggono merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum
3. Sarana dan prasarana yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (2001 : 158).

D. Pelaksanaan Tugas.

Menurut Soeprianto (2002: 99) peningkatan atau kelancaran pelaksanaan tugas didalam suatu organisasi secara tepat dan baik dapat dilihat dari indicator sebagai berikut:

- a. Pembagian tugas
- b. Sumber daya Manusia

- c. Menyelesaikan tugas tepat pada waktunya
- d. Pemberian laporan kerja yang tepat

Menurut FX Soejadi (2002; 13) pelaksanaan tugas yang baik adalah:

- a. Menghindarkan terjadinya pemborosan didalam penyalahgunaan faktor tenaga, kerja, biaya, volume, material, waktu, tahap pekerjaan dan sebagainya.
- b. Menghindar kemacetan- kemacetan dan kesimpangsiuran, sehingga terciptanya efektifitas tugas dalam proses tercapainya tujuan.
- c. Menjamin adanya pemberian kerja, waktu, dan koordinasi yang setepat-tepatnya sehingga ke sederhanaan pekerjaan dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan tugas adalah jumlah pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan tiap- tiap pekerjaan yang dilakukan harus disiplin.

Sedangkan menurut Martoyo (2001; 141) bahwa disiplin berasal dari bahas latin “*discipline*” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat jelas kali bahwa arah dan tujuan disiplin pada dasarnya adalah keharmonisan dan kewajaran, kehidupan atau organisasi baik organisasi formal atau non formal.

E. Sertifikasi

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2011, Sertifikasi guru dalam jabatan selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

F. Dasar Hukum Sertifikasi Guru.

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
4. Peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi guru.

G. Penyelenggaraan Sertifikasi

Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 11 ayat 2 yaitu perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi guru serta penjaminan kualitas sertifikasi guru, jumlah peserta pendidik profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untuk masing- masing Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat.

H. Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Sertifikasi

Sertifikasi guru yang dilakukan oleh perguruan tinggi memiliki syarat di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2011, yaitu:

1. Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.
2. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
3. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
 - a. Kualifikasi akademik
 - b. Pendidik dan pelatihan
 - c. Pengalaman mengajar
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
 - e. Penilaian dari atasan dan pengawas
 - f. Penilaian dari atasan dan pengawas
 - g. Prestasi akademik
 - h. Karya pengembangan profesi
 - i. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
 - j. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan sosial
 - k. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan
4. Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mendapat sertifikat pendidik.

5. Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
 - a. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus.
 - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian.
6. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b mencakup kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.
7. Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikat pendidik.
8. Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

I. Prinsip Sertifikasi Guru.

Prinsip- Prinsip Sertifikasi guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011, ialah:

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntebel.

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik impartial, tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi

guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administrative, financial, dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (Bukan PNS/ swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3. Dilaksanankan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang- Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru.

2.2 Defenisi Konsep

Definisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Definisi operasional merupakan operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut:

1. Implementasi menurut wahab (2001:65) adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu.
2. Sertifikasi dalam pengertian Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.

2.3 Konsep Operasional

Menurut Winardi (2007: 42) konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Konsep operasional merupakan operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Adapun indicator yang mencakup permasalahan dalam penelitian ini ialah:

- a. Pelaksanaan tugas menurut Menurut Soeprianto (2002: 99) ialah:
 1. Pembagian Tugas
 - a) Pengumpulan Portofolio.

b) Penilaian Portofolio.

c) Verifikasi Portofolio

2. Sumber daya manusia

b. Prinsip- Prinsip sertifikasi guru berdasarkan Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 11 Tahun 2011, Yaitu:

1. Peningkatan penghasilan.

2. Peningkatan mutu pendidikan

c. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan menurut Sunggono (2001 : 158), yaitu:

1. Sarana dan prasarana

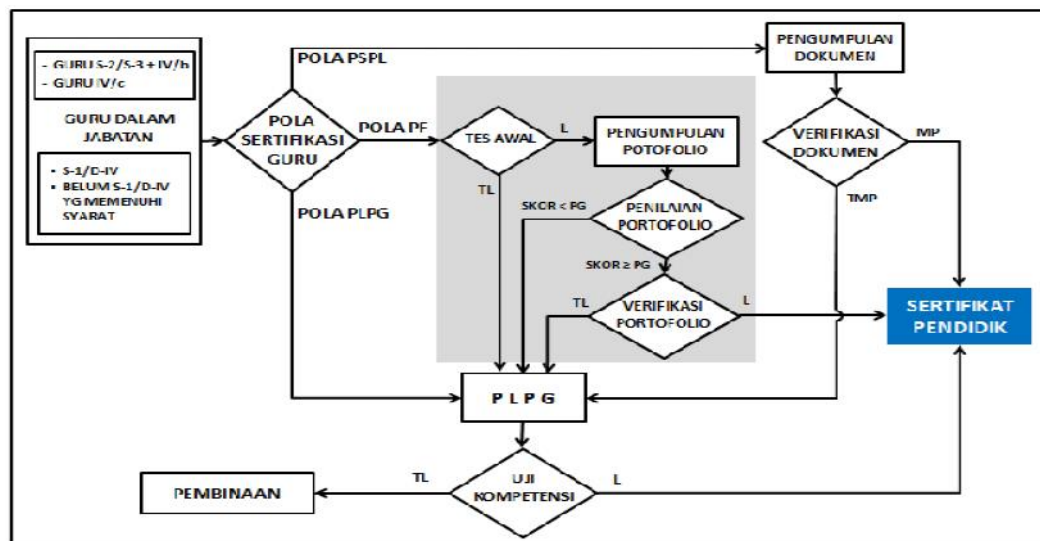
2.4 Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiono, 2005: 183). Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan hipotesis, yaitu: “Diduga sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Bengkalis belum maksimal disebabkan Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Bengkalis belum optimal”.

2.5 Kerangka Pemikiran

Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau mengkatakategorikan komponen- komponen yang relevan dari suatu proses. Sebuah model dapat dikatakan sempurna jika ia mampu memperlihatkan semua aspek- aspek mendukung terjadinya sebuah proses (cangara; 2001; 37).

Gambar 2.1 Alur sertifikasi bagi guru dalam jabatan.



Sumber : Buku Pedoman Penetapan Pelaksanaan sertifikasi Guru 2011

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

1. Guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru pertama kali harus melakukan penilaian terhadap kesiapan dirinya dalam mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kesiapan yang dimaksud ialah:
 - a. Ketersedian dan kelengkapan dokumen portofolio yang dimilikinya.
 - b. Telah melakukan penilaian sendiri terhadap dokumen portofolio yang dimilikinya.
 - c. Memiliki kesiapan diri untuk mengikuti tes awal.
2. Berdasarkan hasil penilaian diri tersebut, kemudian guru melakukan pemilihan pola sertifikasi guru: pola PSPL, pola PF, atau pola PLPG.
3. Peserta yang telah siap mengikuti pola PSPL, mengumpulkan dokumen-dokumen untuk di verifikasi oleh asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan

untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada pedoman penyusunan portofolio. Dokumen berupa:

- a. *Photocopy* ijazah.
 - b. Surat tugas atau surat izin belajar.
 - c. Surat keputusan pangkat atau golongan terakhir.
 - d. Surat keputusan tugas mengajar.
 - e. Surat keputusan sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari Dinas Pendidikan. Untuk selanjutnya berkas disusun oleh peserta sertifikasi pola PSPL disebut dokumen.
4. Proedur pelaksanaan tes awal tertuang dalam panduan tersendiri.
 5. Teknis penyusunan portofolio dan jenis berkas yang disusun mengacu pada penyusunan portofolio. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila dokumen yang dikumpulkan peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka peserta dinyatakan lulus sertifikasi guru dan menerima sertifikat pendidik, sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP) maka secara otomatis menjadi peserta PLPG.
 6. Peserta siap memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib mengikuti tes awal di tempat pelaksanaan tes di tetapkan oleh KSG (*ICT center*) soal tes disediakan oleh KSG melalui website KSG yang hanya dapat dibuka di *ICT Center*.
 - b. Peserta yang mencapai nilai atau skor sama dengan atau lebih tinggi dari batas kelulusan yang ditetapkan oleh KSG, maka

peserta dinyatakan lulus mengikuti pola PF. Peserta yang tidak lulus tes awal secara otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.

- c. Peserta lulus tes awal mendapatkan bukti kelulusan dari *ICT center* dan diberi waktu untuk menyusun portofolio. *Fotocopy* bukti kelulusan tes awal dilampirkan dalam bundle portofolio.
- d. Portofolio yang telah disusun oleh peserta sertifikasi diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/ Kotamadya dan diteruskan kepada rayon LPTK untuk dinilai oleh Asesor.
 - 1) Apabila hasil penilaian PF peserta sertifikasi guru memiliki skor sama dengan atau di atas batas kelulusan, maka kemudian asesor melakukan verifikasi berkas PF yang disusun. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa peserta menguasai kompetensi guru sebagaimana di tunjukan dalam dokumen portofolio maka peserta dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
 - 2) Apabila skor hasil penilaian PF mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan administrasi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap berkas PF yang disusun.
 - 3) Apabila hasil penilaian PF belum mencapai batas kelulusan, peserta harus mengikuti pola PLPG.

7. Peserta mengikuti PLPG adalah peserta yang:
- a. Langsung memilih pola PLPG.
 - b. Memilih pola PF tetapi tidak lulus tes atau tidak lulus penilaian PF, atau tidak lulus berkas PF.
 - c. Berstatus TMP pada pola PSPL.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan dan lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

Rencana Penelitian:

Penelitian Laporan : 01 Februari s.d 29 April 2012

Perbaikan Laporan Penelitian : 30 April S.d 18 Mei 2012.

Laporan Akhir Penelitian : 24 Mei 2012.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis- jenis data menurut Suryabrata (2010; 39):

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.

2. Data Sekunder

Dari bagian ini menjelaskan sumber data yang diambil dalam penelitian yaitu data sekunder. Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak ketiga secara langsung, dalam bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui kantor tempat penelitian, serta melalui studi kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi menurut Arikunto (2002: 108) adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian (Arikunto, 2002:108). Sedangkan Populasi menurut Saebani (2008:167) adalah keseluruhan sumber data dalam penelitian Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan sertifikasi pada Perguruan tinggi di provinsi Riau.

B. Sampel

Sampel menurut Sugiono (2005: 91) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sedangkan sampel Menurut Saebani (2008: 167) adalah bagian yang representatif yang dijadikan sumber data atau responden.

Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel dengan menggunakan teknik sensus, yaitu teknik pengambilan secara keseluruhan populasi. Teknik sensus ini digunakan penulis pada pegawai Panitia sertifikasi guru (PSG) pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan pengambilan sample guru se lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menggunakan rumus Slovin dalam Arikunto (2002; 28) sebagai berikut:

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

n = *number of samples* (Jumlah sample)

N = *Total Population* (Jumlah seluruh anggota populasi)

e = *error tolerance* (toleransi terjadinya kesalahan)

$$n = \frac{4269}{1 + (4269 \times 0,10^2)} = 97,71 \text{ (dibulatkan 98 orang)}$$

Jadi jumlah sample guru se lingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis yang diambil dalam sample penelitian ini sebanyak 98 orang responden guru.

Tabel 3.1 : Daftar Populasi Dan Sampel pada Penelitian Peranan Sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Pegawai Panitia Sertifikasi Guru (PSG)	15	15	100%
2	Guru Se lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	4269	98	100%
Jumlah		4284	113	100%

Sumber: Data olahan Penulis berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data tersebut dilakukan dengan cara :

A. Pengamatan langsung atau observation

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif Saebani (2008; 186). Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati pelaksanaan sertifikasi, serta mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan, mencatat dengan cermat fenomena atau kejadian yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

B. Wawancara atau interview

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan Tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu Saebani(2008; 190).

C. Angket atau Kuesioner

Angket (*Kuesioner*) adalah pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung ataupun tidak langsung menurut Saebani (2008:191).

3.5 Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiono (2005:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Analisis Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Adapun hasil penelitian terhadap Analisis Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum berjalan optimal sebagaimana yang diatur dalam peraturan peundang- undangan.
2. Dalam Pelaksanaan sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum maksimal disebabkan sarana dan prasarana panitia sertifikasi Guru (PSG) belum Optimal.
3. Proses pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor dinas pendidikan kabupaten Bengkalis belum maksimal sehingga peningkatan mutu pendidikan kabupaten Bengkalis belum optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberikan saran-saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan pembagian tugas kurang berjalan optimal, penulis berharap pembagian tugas pelaksanaan sertifikasi guru dimaksimalkan lagi dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi panitia sertifikasi guru (PSG) serta lebih memperhatikan sarana dan prasarana panitia sertifikasi guru (PSG) sehingga menghasilkan peserta sertifikasi yang baik.
2. Bagi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dengan baik merupakan suatu nilai tambah dan citra yang baik dalam mengedepankan efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat serta bisa menjadi bahan informasi bagi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan Kantor Dinas Lainnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Sertifikasi guru.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada akhir pembahasan ini akan dilakukan rekapitulasi terhadap Analisis implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan, sehingga akan diperoleh data yang akurat terhadap Analisis Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

5.1 Identitas Responden

Untuk melanjutkan pembahasan mengenai masalah Analisis Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terlebih dahulu penulis tetapkan beberapa identitas responden dari data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner tersebut, di bawah ini disajikan data dalam tabel distribusi yang akan dijelaskan satu persatu.

Identitas yang ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan antara data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji.

5.1.1 Tingkat Pendidikan

Sepanjang sejarah perkembangan dunia yang bersifat dinamis ini, faktor pendidikan menjadi kemutlakan yang harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan senantiasa menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan

produktivitas yang baik.

Pendidikan merupakan segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia, baik jasmani maupun naluri yang berlangsung seumur hidup, baik dijalur formal maupun informal dalam mengembangkan pembangunan sumber daya manusia.

Oleh karena itu penulis memaparkan tingkat pendidikan dari 113 (Seratus tiga belas) responden dengan rincian 15 (lima Belas) Panitia sertifikasi guru (PSG) dan 98 (Sembilan Puluh Delapan) guru yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.1 Jumlah Resonden pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMA	3	2,65
2.	Diploma tiga (D.3)	24	21,24
3.	Strata Satu (S1)	68	60,18
4.	Strata Dua (S2)	18	15,93
Jumlah		113	100

Sumber: Data Olahan Penulis Berdasarkan Kuesioner

Pada tabel 5.1 dapat digambarkan bahwasanya terdapat 4 (empat) tingkat pendidikan yaitu SLTP, Diploma Tiga (D3), S1, dan S2 dari masing- masing pendidikan dapat dijelaskan bahwasanya untuk tingkat SMA terdapat 3 orang atau (2,65%), tingkat Diploma tiga 24 orang atau (21,24%), tingkat Strata Satu (S1) 68 orang atau (60,18%) dan untuk tingkat Strata Dua (S2) terdapat 18 orang atau (15,93%) dari 113 responden/orang.

5.1.2 Tingkat Umur

Umur merupakan salah satu yang dapat menentukan kematangan seseorang. Semakin tinggi umur seseorang, maka dinilai semakin dewasa dalam menyikapi setiap fenomena karena telah banyaknya pengalaman yang mereka peroleh. Dari karakteristik responden berdasarkan umur yang menjadi responden dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2. Jumlah Resonden pada Dinas Pendidikan Berdasarkan Tingkat Umur.

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	21-30 Tahun	29	25,66
2.	31-40 Tahun	52	46,02
3.	41 Tahun keatas	32	28,32
Jumlah		113	100

Sumber : Data Olahan Penulis Berdasarkan Kuesioner

Pada tabel 5.2 diatas dapat disimpulkan bahwasanya tingkat umur responden dari 21 orang yang berusia 21-30 berjumlah 29 orang atau (25,66%), umur 31-40 berjumlah 52 orang atau (46,02%) dan untuk umur 41 tahun keatas berjumlah 32 orang atau (28,32%).

5.1.3 Jenis Kelamin

Jenis kelamin dinilai perlu untuk dijadikan bahan penelitian sehubungan dengan proses Analisis Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Untuk mengetahui jenis kelamin responden, dapat diketahui sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3. Jumlah Resonden pada Perusahaan Pertambangan Berdasarkan Jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	46	40,71
2.	Perempuan	67	59,29
Jumlah		113	100

Sumber : Data Olahan Penulis Berdasarkan Kuesioner

Pada tabel 5.3 dapat Dianalisa bahwasanya dari 113 responden yang ada yaitu laki-laki dan perempuan dapat dijabarkan laki-laki berjumlah 46 orang atau (40,71%) dan perempuan berjumlah 67 orang atau (59,29%). Dari table 5.3 diatas terlihat bahwasanya responden didominasi oleh perempuan.

5.1.4 Masa kerja

Masa kerja sangat mempengaruhi pada tingkat pemahaman akan pekerjaan seseorang, semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengetahuannya pada bidang pekerjaannya.

Tabel 5.4. Jumlah Resonden pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Lama Bekerja.

No	Lama kerja	Jumlah	Persentase (%)
1.	1-5 Tahun	23	20,35
2.	6-10 Tahun	34	30,09
3.	11-15 Tahun	31	27,43
4.	Diatas 15 tahun	25	22,12
Jumlah		113	100

Pada tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan lama bekerja dari 113 responden 1-5 tahun berjumlah 23 orang atau (20,35%), kemudian 6-10

tahun berjumlah 34 orang atau (30,09%), 11-15 Tahun berjumlah 31 orang atau (27,43%), dan diatas 15 tahun berjumlah 25 orang atau (22,12%)

5.2 Pembagian Tugas

Pada bagian ini akan membahas mengenai pengumpulan potofolio, penilaian portofolio dan verifikasi portofolio.

5.2.1 Pengumpulan Portofolio

Menurut Yamin Portofolio berasal dari bahasa inggris "*portofolio*" yang artinya dokumen atau surat- surat. Dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas-kertas berharga dari pekerjaan tertentu. Pengertian portofolio disini adalah suatu pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan- panduan yang ditentukan (2007: 203).

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang pengumpulan portofolio dalam hal pelaksanaan sertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pengumpulan Portofolio Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	25	22,12%
2	Baik	32	28,31%
3	Kurang baik	36	31,85%
4	Tidak baik	20	17,69%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, terlihat bahwa dari jumlah 113 responden yang dijadikan sampel, hanya 25 responden atau 22,12% responden mengatakan kegiatan pelaksanaan Pengumpulan Portofolio Guru Dalam Jabatan Di Kabupaten

Bengkalis “Sangat baik”, yakni terlaksana sangat Baik. Dan yang masuk kategori “baik” hanya 32 responden atau 28,31 % artinya pelaksanaan Pengumpulan Portofolio Guru Dalam Jabatan Di Kabupaten Bengkalis berjalan baik.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” adalah sebanyak 36 responden atau sekitar 31,85% responden yaitu dalam pelaksanaan Pengumpulan Portofolio Guru Dalam Jabatan Di Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan maksimal. Sisanya 20 responden atau sekitar 17,69% responden mengatakan terkadang kegiatan pelaksanaan Pengumpulan Portofolio Guru Dalam Jabatan Di Kabupaten Bengkalis termasuk kategori “tidak baik”, artinya tidak terlaksana dengan baik.

Tabel 5.6 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Dalam Pengumpulan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	27	23,89 %
2	Baik	31	27,43%
3	Kurang baik	34	30,08 %
4	Tidak baik	21	18,58 %
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.6 di atas, terlihat bahwa dari jumlah 113 responden, hanya 27 responden atau 23,89% responden mengatakan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam hal pengumpulan portofolio sertifikasi kategori “sangat baik” yakni terlaksana dengan sangat baik. Dan yang masuk kategori “baik” hanya 31 responden atau 27,43 % artinya upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam hal pengumpulan portofolio sertifikasi Guru Di Kabupaten Bengkalis berjalan baik.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” adalah sebanyak 34 responden atau sekitar 30,08% responden mengatakan upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam hal pengumpulan portofolio sertifikasi kurang baik. Sisanya 21 responden atau sekitar 18,58% responden mengatakan terkadang dalam upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam hal pengumpulan portofolio sertifikasi termasuk kategori “tidak baik”, artinya tidak terlaksana dengan baik.

Tabel 5.7 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang tindak lanjut Guru Dalam Jabatan yang tidak Mendaftarkan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	21	18,58%
2	Baik	35	30,97%
3	Kurang baik	35	30,97%
4	Tidak baik	22	19,46%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, terlihat bahwa dari jumlah 113 responden yang dijadikan sampel, hanya 21 responden atau 18,58% responden mengatakan tentang tindak lanjut Guru dalam jabatan yang tidak Mendaftarkan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis kategori “sangat baik”, Tentang tindak lanjut Guru dalam jabatan yang tidak Mendaftarkan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis dalam kategori “baik” adalah sebanyak 35 responden atau sekitar 30,97% responden

Sedangkan yang 35 responden atau 30,97% responden mengatakan tentang tindak lanjut Guru dalam jabatan yang tidak Mendaftarkan Portofolio

Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis “kurang baik” karena belum ditindaklanjuti dengan baik. Sisanya 22 responden atau sekitar 19,46% responden mengatakan tentang tindak lanjut Guru dalam jabatan yang tidak Mendaftarkan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis termasuk kategori “tidak baik”, artinya tidak ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

Tabel 5.8: Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Kegiatan Pengumpulan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	19	16,81%
2	Baik	29	25,66%
3	Kurang baik	43	38,05%
4	Tidak baik	22	19,46%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.8 di atas, terlihat bahwa dari jumlah 113 responden yang dijadikan sampel, hanya 19 responden atau 16,81% responden mengatakan proses tentang Kegiatan Pengumpulan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis kategori “sangat baik”, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang masuk kategori “baik” adalah sebanyak 29 responden atau sekitar 25,66% responden yaitu tentang Kegiatan Pengumpulan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan dari jumlah 113 responden yang dijadikan sampel, 43 responden atau 38,05% responden mengatakan tentang Kegiatan Pengumpulan Portofolio Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum Kurang baik. Sisanya 22 responden atau sekitar 19,46% responden mengatakan tentang Kegiatan Pengumpulan Portofolio

Mengenai Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis termasuk kategori “tidak baik”, artinya tidak dilakukan sesuai dengan harapan.

Tabel 5.9 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Prosedur Yang Diterapkan oleh Pemerintah Dalam Hal Pengumpulan Portofolio di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	17	15,04%
2	Baik	30	26,54%
3	Kurang baik	42	37,17%
4	Tidak baik	24	21,23%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.9 di atas, terlihat bahwa 113 responden, hanya 17 responden atau 15,04% responden mengatakan tentang Prosedur yang diterapkan oleh Pemerintah Dalam Hal Pengumpulan Portofolio di Kabupaten Bengkalis kategori “sangat baik”, karena sudah berjalan dengan baik. Dan yang masuk kategori “baik” adalah sebanyak 30 responden atau 26,54% responden yaitu tentang Prosedur Yang Diterapkan oleh Pemerintah Dalam Hal Pengumpulan Portofolio di Kabupaten Bengkalis Sedangkan dari jumlah 113 responden yang dijadikan sampel, 42 responden atau 37,17% responden mengatakan tentang Prosedur Yang Diterapkan oleh Pemerintah Dalam Hal Pengumpulan Portofolio di Kabupaten Bengkalis masuk kategori “kurang baik” artinya belum berjalan dengan baik. Sisanya 24 responden atau sekitar 21,23% responden mengatakan tentang Prosedur Yang Diterapkan oleh Pemerintah Dalam Hal Pengumpulan Portofolio di Kabupaten Bengkalis termasuk kategori “tidak baik”, dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wawancara penulis dengan Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis bapak Drs Kamaruddin, M.Pd mengatakan : *“masih banyaknya system prosedur sertifikasi guru di kabupaten Bengkalis harus dibenahi untuk mencapai tujuan sertifikasi guru yaitu peningkatan mutu pendidikan”*. (Hasil wawancara tanggal 12 April 2012).

Tabel 5.10: Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Pengumpulan Portofolio

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
1	Pengumpulan portofolio guru dalam jabatan	25	32	36	20	113
2	Upaya dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam pengumpulan Portofolio mengenai sertifikasi	27	31	34	21	113
3	Guru yang tidak mendaftarkan portofolio mengenai sertifikasi guru di kabupaten bengkalis sudah ditindak lanjuti	21	35	35	22	113
4	Kegiatan pengumpulan portofolio mengenai sertifikasi guru sudah dilakukan dengan baik	19	29	43	22	113
5	Prosedur dalam hal pengumpulan portofolio berjalan dengan baik	17	30	42	24	113
Jumlah		109	157	190	109	565
Persentase		19,29	27,79	33,63	19,29	100

Tabel 5.10 hasil rekapitulasi tentang pengumpulan portofolio 33,63 % responden mengatakan “kurang baik” artinya pengumpulan portofolio kurang maksimal pada guru dalam jabatan pada proses sertifikasi. Kurang baiknya

pengumpulan portofolio disebabkan masih adanya guru dalam jabatan yang masih belum mendaftarkan portofolio untuk sertifikasi guru dan prosedur dalam hal pengumpulan portofolio belum berjalan baik.

5.2.2 Penilaian Portofolio

Yamin menyebutkan bahwa penilaian portofolio harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (2007: 203) :

- a. Karya dikumpulkan adalah benar- benar karya yang bersangkutan.
- b. Menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikerjakan.
- c. Mengumpulkan dan menyimpan sampel karya
- d. Menentukan criteria untuk menilai portofolio.
- e. Meminta peserta didik untuk menilai secara terus menerus hasil portofolionya.
- f. Merencanakan pertemuan dengan peserta didik yang dinilai.
- g. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam penilaian portofolio.

Adapun gambaran tentang penilaian portofolio dalam sertifikasi guru dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.11 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Dinas Pendidikan telah membuat penilaian portofolio di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	28	24,78%
2	Baik	17	15,04%
3	Kurang baik	43	38,05%
4	Tidak baik	25	22,12%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.11 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang kegiatan Penilaian Portofolio pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, ternyata sebagian besar masuk kategori “kurang baik” yaitu dari jumlah 113 responden, 43 responden atau sekitar 38,05% responden menyatakan petugas terkait belum maksimal melakukan tentang kegiatan Penilaian Portofolio pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Bengkalis dengan baik. Dan 25 responden atau sekitar 22,12% responden memberi tanggapan “tidak baik”, yaitu petugas Dinas terkait tidak melakukan dengan benar sehingga penilaian portofolio tidak transparan.

Sedangkan 17 responden atau sekitar 15,04% responden menyatakan “baik”, karena petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terkait telah melakukan kegiatan Penilaian Portofolio pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Sisanya 28 responden atau sekitar 24,78% responden mengatakan “sangat baik” ini sudah sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan menteri dalam negeri No 11 tahun 2011.

Tabel 5.12 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penilaian Portofolio Apakah Sudah Dilakukan Dengan Baik Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	19	16,81%
2	Baik	22	19,47%
3	Kurang baik	32	28,32%
4	Tidak baik	40	35,40%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.12 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang Penilaian Portofolio Dilakukan Dengan Baik oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis “sangat baik” yaitu 19 responden atau sekitar 16,81% responden menyatakan petugas terkait telah melakukan Penilaian Portofolio yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis sudah maksimal. Dan 22 responden atau sekitar 19,47% responden memberi tanggapan “baik”, yaitu petugas Penilaian Portofolio yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dengan baik.

Sedangkan 32 responden atau sekitar 28,32% responden menyatakan “kurang baik”, karena petugas Penilaian Portofolio yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak maksimal. Sisanya 40 responden atau sekitar 35,40% responden mengatakan “tidak baik” artinya Penilaian Portofolio yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak berjalan dengan baik.

Tabel 5.13 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penilaian Portofolio yang Dibuat Tesebut Berdasarkan Keadaan yang Terjadi Dilapangan dan Apakah Sudah Disusun dengan Baik di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	32	28,32%
2	Baik	29	25,66%
3	Kurang baik	30	26,55%
4	Tidak baik	22	19,47%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.13 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang Penilaian Portofolio yang Dibuat Tesebut Berdasarkan Keadaan yang Terjadi Dilapangan dan Apakah Sudah Disusun dengan Baik di Kabupaten Bengkalis, ternyata sebagian besar masuk kategori “kurang baik” yaitu 30 responden atau 26,55% responden menyatakan Penilaian Portofolio yang Dibuat Tesebut Berdasarkan Keadaan yang Terjadi Dilapangan. Dan 22 responden atau 19,47% responden memberi tanggapan “tidak baik”, yaitu Penilaian Portofolio yang Dibuat Tesebut tidak Berdasarkan Keadaan yang Terjadi Dilapangan.

Sedangkan 29 responden atau 25,66% responden menyatakan “baik”, karena Penilaian Portofolio yang Dibuat tesebut sudah Berdasarkan Keadaan yang

Terjadi Dilapangan. Sisanya 6 responden atau 15% responden mengatakan “sangat baik” hal ini terlihat dari Penilaian Portofolio yang dibuat tersebut Berdasarkan Keadaan yang terjadi dilapangan.

Tabel 5.14 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Para Guru Dalam Jabatan yang tidak Lulus Dalam Penilaian Portofolio, apakah Sudah Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	9	7,96%
2	Baik	23	20,35%
3	Kurang baik	54	47,79%
4	Tidak baik	27	23,89%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.14 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang Para Guru Dalam Jabatan yang tidak Lulus Dalam Penilaian Portofolio, apakah Sudah Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis, ternyata sebagian besar masuk kategori “sangat baik” yaitu 9 responden atau 7,96% responden menyatakan Para Guru Dalam Jabatan yang tidak Lulus Dalam Penilaian Portofolio sudah ditindak lanjuti oleh dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis. Dan 23 responden atau 20,35% responden menyatakan “baik” artinya Para Guru Dalam Jabatan yang tidak Lulus Dalam Penilaian Portofolio sudah ditindak lanjuti oleh dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis dengan maksimal.

Sedangkan 54 responden atau 47,79% responden memberi tanggapan “kurang baik”, yaitu Para Guru Dalam Jabatan yang tidak Lulus Dalam Penilaian Portofolio belum ditindak lanjuti oleh dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis. Sisanya 27 responden atau 23,89% responden mengatakan “tidak baik” ini terlihat

Para Guru Dalam Jabatan yang tidak Lulus Dalam Penilaian Portofolio tidak ditindak lanjuti oleh dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis dengan maksimal.

Tabel 5.15 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penilaian Portofolio yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan kemampuan guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	7	6,19%
2	Baik	13	11,50%
3	Kurang baik	61	53,98%
4	Tidak baik	32	28,32%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.15 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang Penilaian Portofolio yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan kemampuan guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis, ternyata sebagian besar masuk kategori “sangat baik” yaitu 7 responden atau 6,19% responden menyatakan Penilaian Portofolio yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan kemampuan guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis, dan 13 responden atau 11,50% responden masuk kategori “baik” artinya Penilaian Portofolio yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan kemampuan guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan 61 responden atau 53,98% responden memberi tanggapan “kurang baik”, yaitu Penilaian Portofolio yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum sesuai dengan kemampuan guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis. Sisanya 32 responden atau 28,32% responden menyatakan

“tidak baik”, karena Penilaian Portofolio yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan kemampuan guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.16: Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Penilaian Portofolio

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
1	Pembuatan Penilaian Portofolio oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	28	17	43	25	113
2	Penilaian Portofolio yang dilakukan Dinas Pendidikan	19	22	32	40	113
3	Penyusunan Penilaian portofolio yang dibuat berdasarkan keadaan di lapangan.	32	29	30	22	113
4	Tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pendidikan terkait dengan guru yang tidak lulus.	9	23	54	27	113
5	Penilaian portofolio sudah sesuai dengan kemampuan guru dalam Jabatan.	7	13	61	32	113
Jumlah		95	104	220	146	565
Persentase		16,81	18,41	38,94	25,84	100

Tabel 5.16 hasil rekapitulasi tentang penilaian portofolio 38,94 % mengatakan “kurang baik” artinya penilaian portofolio kurang baik dan belum memberikan penilaian portofolio kurang maksimal kepada guru dalam jabatan pada proses sertifikasi guru. Hal ini disebabkan pelaksanaan penilaian portofolio belum sesuai dengan kondisi lapangan dan tindak lanjut Dinas Pendidikan terhadap peserta yang tidak lulus kurang maksimal dilaksanakan serta masih adanya penilaian portofolio terhadap guru yang belum sesuai dengan kemampuan.

5.2.3 Verifikasi Portofolio

Menurut Yamin Tujuan verifikasi portofolio ialah sebagai berikut (2007: 204):

- a. Dapat menghargai perkembangan hasil kerja guru selama mengajar.
- b. Memberi perhatian pada prestasi kerja guru yang terbaik.
- c. Dapat mendokumentasikan hasil proses pembelajaran yang berlangsung.

Untuk lebih jelas mengenai verifikasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat dari jawaban responden berikut ini :

Tabel 5.17: Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Verifikasi Portofolio dalam Sertifikasi Guru Dilakukan Panitia Pelaksana yang Berwenang Terhadap Setiap Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	13	11,50%
2	Baik	42	37,17%
3	Kurang baik	28	24,78%
4	Tidak baik	30	26,55%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.17 di atas menggambarkan tanggapan dari 13 atau 11,50% responden mengatakan “sangat baik” dalam verifikasi Portofolio dalam sertifikasi guru dilakukan panitia Pelaksana yang Berwenang Terhadap Setiap Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Bengkalis yang termasuk kategori “baik” 42 responden atau 37,17% responden mengatakan verifikasi Portofolio dalam sertifikasi guru dilakukan panitia Pelaksana yang Berwenang Terhadap Setiap Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Bengkalis

Sedangkan 28 responden atau 24,78% mengatakan dalam verifikasi Portofolio dalam sertifikasi guru dilakukan panitia Pelaksana yang Berwenang Terhadap Setiap Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Bengkalis “kurang baik”, dan sisanya 30 responden atau 26,55% mengatakan verifikasi Portofolio dalam sertifikasi guru dilakukan panitia Pelaksana yang Berwenang Terhadap Setiap Guru Dalam Jabatan di Kabupaten Bengkalis “tidak baik”.

Tabel 5.18 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang prosedur dalam verifikasi portofolio yang dilakukan panitia di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	36	31,85%
2	Baik	21	18,58%
3	Kurang baik	42	37,17%
4	Tidak baik	14	12,39%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.18 di atas menggambarkan 36 responden atau 31,85% responden mengatakan “sangat baik” dalam prosedur dalam verifikasi portofolio yang dilakukan panitia di Kabupaten Bengkalis. Dan yang termasuk dalam kategori “baik” 21 responden atau 18,58% responden mengatakan prosedur dalam verifikasi portofolio yang dilakukan panitia di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan 42 responden atau 37,17% mengatakan prosedur dalam verifikasi portofolio yang dilakukan panitia di Kabupaten Bengkalis “kurang baik” dan sisanya 14 responden atau 12,39% mengatakan prosedur dalam verifikasi portofolio yang dilakukan panitia di Kabupaten Bengkalis “tidak baik”.

Tabel 5.19 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang System Dan Prosedur yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam Hal Verifikasi Portofolio di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	37	32,74%
2	Baik	9	7,96%
3	Kurang baik	34	30,08%
4	Tidak baik	33	29,20%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.19 di atas menggambarkan 37 responden atau 32,74% responden mengatakan System Dan Prosedur yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam Hal Verifikasi Portofolio di Kabupaten Bengkalis “sangat baik” dan yang termasuk dala kategori “baik” 9 responden atau 7,96% responden mengatakan System Dan Prosedur yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam Hal Verifikasi Portofolio di Kabupaten Bengkalis

Sedangkan 34 responden atau 30,08% responden mengatakan System Dan Prosedur yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam Hal Verifikasi Portofolio di Kabupaten Bengkalis “kurang baik” dan sisanya 33 responden atau 29,20% responden mengatakan System Dan Prosedur yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam Hal Verifikasi Portofolio di Kabupaten Bengkalis “tidak baik”.

Tabel 5.20 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Hambatan yang Dialami Oleh Petugas Pelaksana Pada Verifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	17	15,04%
2	Baik	23	20,35%
3	Kurang baik	37	32,74%
4	Tidak baik	36	31,86%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.20 di atas menggambarkan 17 responden atau 15,04 responden mengatakan Hambatan yang Dialami Oleh Petugas Pelaksana Pada Verifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis “sangat baik” dan yang termasuk kategori “baik” 23 responden atau 20,35% responden mengatakan ada Hambatan yang Dialami Oleh Petugas Pelaksana Pada Verifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan 37 responden atau 32,74% responden mengatakan Hambatan yang Dialami Oleh Petugas Pelaksana Pada Verifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis “kurang baik” dan sisanya 36 responden atau 31,86% responden mengatakan Hambatan yang Dialami Oleh Petugas Pelaksana Pada Verifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis “tidak baik”.

Tabel 5.21 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Peraturan Verifikasi Guru Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	21	18,58%
2	Baik	28	24,78%
3	Kurang baik	34	30,09%
4	Tidak baik	30	26,55%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.21 di atas menggambarkan 21 responden atau 18,58% responden mengatakan Peraturan Verifikasi Guru Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis “sangat baik”, yang termasuk kategori “baik” 28 responden atau 24,78% responden mengatakan Peraturan Verifikasi Guru Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

Sedangkan 34 responden atau 30,09% mengatakan Peraturan Verifikasi Guru Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis “kurang baik”, dan sisanya

30 responden atau 26,55% mengatakan Peraturan Verifikasi Guru Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis “tidak baik”.

Tabel 5. 22 Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Verifikasi Portofolio

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
1	Verifikasi portofolio yang dilakukan panitia terhadap guru dalam jabatan.	13	42	28	30	113
2	Prosedur dalam verifikasi portofolio	36	21	42	14	113
3	Sistem dan prosedur dalam hal Verifikasi portofolio	37	9	34	33	113
4	Hambatan pada saat verifikasi guru	17	23	37	36	113
5	Peraturan verifikasi portofolio	21	28	34	30	113
Jumlah		124	123	175	143	565
Persentase		21,95	21,77	30,97	25,31	100

Dari tabel 5.22 hasil rekapitulasi tentang verifikasi portofolio dalam proses pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa 30,97% responden mengatakan “kurang baik” hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya peran para panitia sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis tersebut, sistem prosedur dalam verifikasi portofolio masih belum jelas dalam pelaksanaan sertifikasi guru.

5.3 Sumber Daya Manusia

Kegiatan manajemen tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan sumber daya manusia yang andal. Menurut Terry Sumber daya manusia (*human resources*) juga dinamakan personalia (*personnel*), adalah orang yang bekerja dalam organisasi atau orang

yang melakukan aktivitas-aktivitas atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia atau orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan bekerja secara professional dan mengedepankan kualitas dari pekerjaan tersebut akan menghasilkan out put yang baik dan memuaskan (2009: 127).

Menurut Fahmi dalam hal hasil kinerja atau untuk mengukur kinerja para personalia ada dua kriteria yang dapat digunakan yaitu *effectiveness* dan *efficiency*. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Ini termasuk pemilihan metode-metode yang tepat untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Sementara efisiensi adalah kemampuan untuk membuat penggunaan sumber-sumber daya yang ada secara baik dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran (2011: 123).

Untuk itu dalam proses sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis merupakan rangkaian kegiatan pegawai yang pada dasarnya tidak terlepas dari penataan administrasi yang meliputi pengelolaan berbagai data tentang jumlah guru yang sesuai dengan jurusan mengedepankan metode efektivitas dan efisiensi, sehingga administrasi berjalan dengan baik dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Tegasnya, pihak Dinas pendidikan kabupaten Bengkalis selaku panitia pelaksana dalam sertifikasi guru dalam jabatan dituntut melakukan pencatatan data-data guru di Kabupaten Bengkalis tersebut, melakukan pelayanan terbaik kepada guru dalam jabatan dan bekerja dengan baik serta professional pada proses sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis.

Adapun gambaran yang jelas tentang kualitas kerja (sumber daya manusia) dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.23 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Petugas Pelaksana Sertifikasi Guru Dalam Pemberian Pelayanan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	13	11,50%
2	Baik	42	37,17%
3	Kurang baik	28	24,78%
4	Tidak baik	30	26,55%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.23 di atas menggambarkan 13 responden atau 11,50% responden mengatakan bahwa Petugas Pelaksana Sertifikasi Guru Dalam Pemberian Pelayanan di Kabupaten Bengkalis “sangat baik” yang termasuk kategori “baik” 42 responden atau 37,17% responden mengatakan Petugas Pelaksana Sertifikasi Guru Dalam Pemberian Pelayanan di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan 28 responden atau 24,78% responden mengatakan bahwa Petugas Pelaksana Sertifikasi Guru Dalam Pemberian Pelayanan di Kabupaten Bengkalis “kurang baik”. Dan sisanya mengatakan bahwa Petugas Pelaksana Sertifikasi Guru Dalam Pemberian Pelayanan di Kabupaten Bengkalis “tidak baik”

Tabel 5.24 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Latar Belakang Pendidikan dan Skill Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	21	18,58%
2	Baik	9	7,97%
3	Kurang baik	55	48,67%
4	Tidak baik	28	24,77%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.24 di atas menggambarkan 21 responden atau 18,58% mengatakan Latar Belakang Pendidikan dan Skill Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis “sangat baik” dan yang termasuk kategori “baik” 9 responden atau 7.97% mengatakan Latar Belakang Pendidikan dan Skill Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan 55 responden atau 48,77% responden mengatakan Latar Belakang Pendidikan dan Skill Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis “kurang baik”, dan sisanya 28 responden atau 24,77 responden mengatakan Latar Belakang Pendidikan dan Skill Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis “tidak baik”

Tabel 5.25 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Proses Perekrutan Para Panitia Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	13	11,50%
2	Baik	29	25,66%
3	Kurang baik	34	30,09%
4	Tidak baik	37	32,74%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.25 di atas menggambarkan 13 responden atau 11,50% mengatakan Proses Perekrutan Para Panitia Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis “sangat baik”, dan yang termasuk kategori “baik” 29 responden atau 25,66% responden mengatakan Proses Perekrutan Para Panitia Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan 34 responden atau 30,09% responden Proses Perekrutan Para Panitia Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis “kurang baik”, dan sisanya 37 responden atau 32,74% responden Proses Perekrutan Para Panitia Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis “tidak baik”.

Tabel 5.26 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Para Petugas Pelaksana Sertifikasi Menguasai Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	23	20,35%
2	Baik	19	16,81%
3	Kurang baik	29	25,66%
4	Tidak baik	42	37,17%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Tabel 5.26 di atas menggambarkan 23 responden atau 20,35% responden mengatakan Para Petugas Pelaksana Sertifikasi Menguasai Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis “sangat baik” yang termasuk kategori “baik” 19 responden atau 16,81% mengatakan Para Petugas Pelaksana Sertifikasi Menguasai Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan 29 responden atau 25,66% responden mengatakan Para Petugas Pelaksana Sertifikasi Menguasai Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Guru

di Kabupaten Bengkalis” kurang baik” , dan sisanya 42 responden atau 37,17% responden mengatakan Para Petugas Pelaksana Sertifikasi Menguasai Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kabupaten Bengkalis” tidak baik”

Tabel 5.27 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Kinerja Para Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	15	13,27%
2	Baik	18	15,93%
3	Kurang baik	43	38,05%
4	Tidak baik	37	32,74%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011

Tabel 5.27 di atas menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, 15 responden atau 13,27% responden mengatakan tentang Kinerja Para Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis “sangat baik”, dan 18 responden atau sekitar 15,93% responden menanggapi “baik” karena Kinerja Para Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis bagus.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” sebanyak 43 responden atau sekitar 38,05% responden karena Panitia pelaksana dalam melaksanakan sertifikasi belum berjalan dengan baik, sisanya 37 responden atau 32,74% responden masuk kategori “tidak baik” artinya panitia gagal dalam melakukan Kinerja Para Petugas Pelaksana Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.28 Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Kualitas Kerja (sumber daya manusia).

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
Kualitas Kerja (Sumber Daya Manusia)						
1	Pemberian layanan oleh petugas pelaksana sertifikasi guru	13	42	28	30	113
2	Pendidikan dan skil petugas	21	9	55	28	113
3	Proses perekrutan panitia pelaksana sertifikasi guru	13	29	34	37	113
4	Petugas pelaksana sertifikasi guru menguasai tentang tata cara sertfikasi guru	23	19	29	42	113
5	Kinerja para petugas pelaksana sertfikasi guru	15	18	43	37	113
Jumlah		85	117	189	174	565
Persentase		15,04	20,71	33,45	30,98	100

Tabel 5.28 hasil rekapitulasi penilaian responden tentang sumber daya manusia 33,45% responden mengatakan “kurang baik” artinya sumber daya manusianya kurang andal dan belum memberikan pelayanan yang baik kepada guru dalam jabatan pada proses sertifikasi guru hal ini disebabkan kemampuan dan skil petugas masih kurang maksimal, kejelasan prosedur belum baik dalam perekrutan panitia pelaksana dan kinerja para petugas pelaksana sertifikasi kurang maksimal.

Dari hasil rekapitulasi penilaian responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis ada yang berlatar belakang pendidikan tinggi yaitu strata 1 (S1), tetapi ada juga pegawai yang berpendidikan Diploma 1 (D1). Sehingga kinerja sumber daya manusia (pegawai) Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis belum maksimal dalam melaksanakan Sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis.

5.4 Peningkatan Penghasilan

Untuk mengetahui Analisis Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.29 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penghasilan Guru Dalam Jabatan Yang Sudah Di Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	28	24,78%
2	Baik	37	32,74%
3	Kurang baik	31	27,43%
4	Tidak baik	17	15,04%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 5.29 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, 28 responden atau 24,78% responden mengatakan tentang Penghasilan Guru Dalam Jabatan Yang Sudah Di Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis “sangat baik”, dan 37 responden atau sekitar 32,74% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa Penghasilan Guru Dalam Jabatan Yang Sudah Di Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis baik.

Sedangkan sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 31 responden atau 27,43% responden menyatakan bahwa Penghasilan Guru Dalam Jabatan Yang Sudah Di Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis baik.. Sisanya 17 responden atau 15,04% responden mengatakan “tidak baik” dalam Penghasilan Guru Dalam Jabatan Yang Sudah Di Sertifikasi di Kabupaten Bengkalis baik

Tabel 5.30 : Distribusi Frekuensi tanggapan Respondenn tentang Pemerintah Sudah Tepat Waktu Dalam Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	31	27,43%
2	Baik	42	37,16%
3	Kurang baik	23	20,5%
4	Tidak baik	17	15,04%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.30 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 31 responden atau 27,43% responden menyatakan Pemerintah Sudah Tepat Waktu Dalam Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis, dan 42 responden atau 37,16 % responden memberi tanggapan “baik”, artinya Pemerintah Sudah Tepat Waktu Dalam Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis.

Sebagian masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 23 responden atau 20,5% responden menyatakan bahwa menyatakan Pemerintah Sudah Tepat Waktu Dalam Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis baik. Sedangkan 17 responden atau sekitar 15,04% responden memberi

tanggapan “Tidak baik”, dengan alasan bahwa menyatakan Pemerintah Sudah belum Tepat Waktu Dalam Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis

Tabel 5.31 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pemerintah Sudah Melakukan Pembayaran Penghasilan Sertifikasi Guru Dengan Baik Sesuai Dengan Jumlah Atau Tarif di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	35	30,97%
2	Baik	63	55,75%
3	Kurang baik	15	13,27%
4	Tidak baik	-	-
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.31 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, yakni 35 responden atau 30,97% responden mengatakan “sangat baik” karena menurut responden Pemerintah Sudah Melakukan Pembayaran Penghasilan Sertifikasi Guru Dengan Baik Sesuai Dengan Jumlah Atau Tarif di Kabupaten Bengkalis sesuai aturan yang telah ditentukan, dan 63 responden atau 55,75% responden memberi tanggapan “baik”, menyatakan Pemerintah Sudah Melakukan Pembayaran Penghasilan Sertifikasi Guru Dengan Baik Sesuai Dengan Jumlah Atau Tarif di Kabupaten Bengkalis

Sedangkan sisanya 15 responden atau 13,27% responden memberi tanggapan “Kurang baik”, Pemerintah belum Melakukan Pembayaran Penghasilan Sertifikasi Guru Dengan Baik Sesuai Dengan Jumlah Atau Tarif di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.32 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Guru yang Sudah Disertifikasi, Apakah Mereka Merasa Sudah Puas Dengan Penghasilan Sertifikasi yang Ditetapkan Pemerintah di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	25	22,12%
2	Baik	36	31,86%
3	Kurang baik	31	27,43%
4	Tidak baik	21	18,58%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.32 diatas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “baik”, yakni 36 responden atau 31,86% responden menyatakan bahwa Guru yang sudah disertifikasi merasa puas dengan gaji yang ditetapkan Pemerintah, dan 25 responden atau 22,12% responden memberi tanggapan “sangat baik”, karena Guru yang sudah disertifikasi merasa puas dengan gaji yang ditetapkan Pemerintah sangat baik.

Sisanya 31 responden atau 27,43% responden dan 21 Responden atau 18,58% Responden memberi tanggapan “kurang baik” dan “tidak Baik”, dengan alasan bahwa Guru yang sudah disertifikasi merasa tidak puas dengan gaji yang ditetapkan Pemerintah.

Tabel 5.33: Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penundaan Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	20	17,70%
2	Baik	73	64,60%
3	Kurang baik	20	17,70%
4	Tidak baik	-	-
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.33 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “baik”, yakni 73 responden atau sekitar 64,60% responden menyatakan bahwa tidak ada Penundaan Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis, dan 20 responden atau sekitar 17,70% responden memberi tanggapan “Sangat baik”, dengan alasan tidak ada Penundaan Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis

Sedangkan 20 responden atau sekitar 17,70% responden mengatakan “kurang baik” karena menurut responden ada Penundaan Pembayaran Penghasilan Guru yang Sudah Disertifikasi di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.34 Rekapitulasi Penilaian responden tentang Peningkatan Penghasilan di Kabupaten Bengkalis

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
Peningkatan Penghasilan						
1	Penghasilan Guru yang sudah disertifikasi	28	37	31	17	113
2	Waktu pembayaran penghasilan guru yang sudah disertifikasi	31	42	23	17	113
3	Peran pemerintah dalam pembayaran penghasilan guru yang sudah disertifikasi	35	63	15	-	113
4	Kepuasan guru dengan penghasilan setelah disertifikasi	25	36	31	21	113
5	Penundaan penghasilan bagi guru yang sudah disertifikasi	20	73	20	-	113
Jumlah		139	251	120	55	565
Persentase		24,60	44,42	21,24	9,73	100

Dari tabel 5.34 hasil rekapitulasi penilaian responden tentang peningkatan penghasilan guru yang sudah disertifikasi 44,42% responden mengatakan “baik” karena setelah disertifikasi guru pemerintah menambahkan tunjangan profesi terhadap guru yang sudah disertifikasi hal ini disebabkan Peran pemerintah dalam pembayaran penghasilan guru yang sudah disertifikasi menurut responden sudah baik, dan pembayaran gaji guru yang sudah disertifikasi tepat waktu serta kepuasan guru setelah mengalami peningkatan penghasilan pasca disertifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Bapak Syahrudin, S.Si. ia mengatakan : *“kalau dilihat penghasilan guru yang sudah disertifikasi mengalami kenaikan akibat adanya tunjangan profesi, tunjangan itu diberikan supaya peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Bengkalis bisa baik. Karena prinsip sertifikasi guru salah satunya Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.* (hasil wawancara tanggal 12 April 2012).

Dari jawaban responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan mendasar peningkatan penghasilan guru yang sudah disertifikasi dengan tujuan Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

5.5 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuatu hal yang mutlak, pemerintah menetapkan aturan dengan PP No 19 tahun 2005 pasal 42 ayat 1: “setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.

Untuk mengetahui bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sertifikasi guru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.35 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah memberikan Sarana dan prasarana dalam penerimaan sertifikasi guru Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	15	13,27%
2	Baik	13	11,50%
3	Kurang baik	51	45,13%
4	Tidak baik	34	30,08%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.35 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, 51 responden atau 45,13% responden mengatakan tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan Sarana dan prasarana dalam penerimaan sertifikasi guru Kabupaten Bengkalis “Kurang Baik” Disebabkan jarak tempuh dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang jauh, dan 34

responden atau sekitar 30,08% responden memberi tanggapan “Tidak baik”, dengan alasan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan Sarana dan prasarana dalam penerimaan sertifikasi guru Kabupaten Bengkalis dirasakan responden tidak baik.

Sedangkan sebagian besar masuk dalam kategori “sangat baik”, yakni 15 responden atau 13,27% responden menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan Sarana dan prasarana dalam penerimaan sertifikasi guru Kabupaten Bengkalis. Sisanya 13 responden atau 11,50% responden mengatakan “baik” karena Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan Sarana dan prasarana dalam penerimaan sertifikasi guru Kabupaten Bengkalis yang baik.

Tabel 5.36 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Sarana Dan Prasarana Apakah Sudah Tersedia Dengan Baik Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	18	15,93%
3	Kurang baik	69	61,06%
4	Tidak baik	26	23,01%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.36 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 69 responden atau 61,06% responden menyatakan ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan Kurang baik dan 26 responden atau 23,01% responden memberi tanggapan “tidak baik”, artinya Dinas Pendidikan Tidak Baik dalam menyediakan sarana dan Prasarana.

Sedangkan 18 responden atau sekitar 15,93% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan Sarana dan prasarana dalam penerimaan sertifikasi guru Kabupaten Bengkalis baik.

Tabel 5.37 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang sarana dan prasarana yang disediakan tersebut sesuai kebutuhan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	23	20,35%
3	Kurang baik	59	52,21%
4	Tidak baik	31	27,43%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.37 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, yakni 59 responden atau 52,21% responden mengatakan “kurang baik” karena menurut responden ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan kebutuhan para peserta sertifikasi, dan 31 responden atau 27,43% responden memberi tanggapan “tidak baik”,

Sedangkan 23 responden atau sekitar 20,35% responden menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas pendidikan sesuai dengan kebutuhan proses pelaksanaan sertifikasi guru.

Tabel 5.38 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Sarana Dan Prasarana yang tidak Baik, Apakah Sudah Ditindak Lanjuti Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	13	11,50%
2	Baik	28	24,78%
3	Kurang baik	36	31,86%
4	Tidak baik	36	31,86%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.38 diatas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, dan “ Tidak baik” yakni 36 responden atau 31,86% responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang tidak baik belum ditindak lanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

Sisanya 13 responden atau 11,50% responden memberi tanggapan “Sangat baik”, dengan alasan Dinas Pendidikan sudah menindak lanjuti sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan sertifikasi guru. Sedangkan 28 Responden atau 24,78 % memberi tanggapan “Baik” mengenai tidak lanjut Dinas Pendidikan terkait sarana dan prasarana yang tidak baik.

Tabel 5.39: Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	13	11,50%
2	Baik	23	20,35%
3	Kurang baik	47	41,59%
4	Tidak baik	30	26,55%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.39 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 47 responden atau sekitar 41,59% responden menyatakan bahwa Penyediaan Sarana dan Prasarana Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis kurang baik, dan 30 responden atau sekitar 26,55% responden memberi tanggapan “tidak baik”, dengan alasan Sarana dan Prasarana Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis tidak baik.

Sedangkan 13 responden atau sekitar 11,50% responden mengatakan “sangat baik” karena menurut responden Penyediaan Sarana dan Prasarana Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis sangat baik. Sisanya 23 responden atau sekitar 20,35% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa Penyediaan Sarana dan Prasarana Oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.40 Rekapitulasi Penilaian responden tentang Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bengkalis

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
Peningkatan Penghasilan						
1	Sarana dan Prasarana dalam proses sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.	15	13	51	34	113
2	Ketersedian Sarana dan Prasarana pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.	-	18	69	26	113
3	Kesesuaian Sarana dan	-	23	59	31	113

	Prasarana dengan Kebutuhan					
4	Tindak lanjut Dinas Pendidikan terhadap sarana dan prasarana yang kurang baik.	13	28	36	36	113
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana	13	23	47	30	113
Jumlah		41	105	262	157	565
Persentase		7,26	18,58	46,37	27,79	100

Dari tabel 5.40 hasil rekapitulasi penilaian responden tentang sarana dan prasarana dalam proses sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menunjukkan 46,37% responden mengatakan “kurang baik” karena banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi kurang tersedia. Kurang baiknya sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan sertifikasi disebabkan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sertifikasi guru, tidak sesuai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sertifikasi sehingga tidak mendukung proses pelaksanaan sertifikasi selain dari pada itu kurangnya tindak lanjut dinas pendidikan terhadap sarana dan prasarana yang tidak baik.

Dapat disimpulkan dari hasil rekapitulasi penyebaran kuisioner secara keseluruhan dan hasil observasi di lapangan prsoses sertifikasi masih dijumpai sarana dan prasarana yang kurang baik dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Bengkalis.

Berikut ini adalah gambaran kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh panitia sertifikasi guru (PSG) pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.41 : Jumlah Dan Kondisi Sarana dan Prasarana Panitia Sertifikasi Guru Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

No	Nama Saran da Prasarana	Jumlah Aset Tetap	Kondisi Aset Tetap			
			Baik	Rusak	Hilang	Dalam Pengerjaan
1	Peralatan Kantor					
	a. Komputer	3	1	2		
	b. Mesin ketik	1	1			
	c. Printer	2	2			
	d. Alat-alat Komunikasi	1		1		
	e. Mesin Photocopy	1		1		
2	Meubelier					
	a. Meja	15	13	2		
	b. Kursi	15	15			
	c. Lemari Arsip	2	2			
Jumlah		40	34	6		
Persentasi		100%	85 %	15 %		

Sumber : Data Olahan Penulis dari Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Dari Tabel 5.41 tentang jumlah dan kondisi sarana dan prasarana Panitia sertifikasi guru pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat masih terdapat sarana dan prasarana kurang memadai yang diakibatkan keterbatasan sarana dan prasarana serta di temukannya sarana dan prasarana yang rusak. Jumlah sarana dan prasarana secara keseluruhan berjumlah 40 atau 100% yang terdiri dari 34 atau 85% sarana dan prasarana yang baik sedangkan 6 atau 15% rusak. Sarana dan prasarana yang rusak terdiri dari komputer, mesin photocopy, alat komunikasi dan meja. Komputer merupakan sarana dan prasarana yang sangat berperan dalam proses sertifikasi jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah panitia sertifikasi guru (PSG)

5.6 Peningkatan Mutu Pendidikan

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

Untuk mengetahui Analisis Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.42 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang program sertifikasi guru telah membuat peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	12	10,62%
2	Baik	16	14,16%
3	Kurang baik	49	43,36%
4	Tidak baik	36	31,85%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.42 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, 12 responden atau 10,62% responden mengatakan tentang program sertifikasi guru telah membuat peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis berkatagori “sangat baik”, dan 16 responden atau sekitar 14,16% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa program sertifikasi guru telah membuat peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 49 responden atau 43,36% responden menyatakan program sertifikasi guru belum membuat peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Sisanya 36 responden atau 31,85% responden mengatakan “tidak baik” karena program sertifikasi guru belum dirasakan berdampak peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.43: Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang peningkatan mutu pendidikan, apakah sudah dilakukan dengan baik oleh guru yang sudah disertifikasi di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	17	15,04%
2	Baik	18	15,93%
3	Kurang baik	37	32,74%
4	Tidak baik	41	36,28%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.43 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “Tidak baik”, yakni 41 responden atau 36,28% responden menyatakan bahwa guru yang disertifikasi belum memberikan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Bengkalis dan 37 responden atau 32,74% responden memberi tanggapan “Kurang baik”, artinya guru yang disertifikasi belum memberikan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Bengkalis

Sedangkan 17 responden atau sekitar 15,04% responden memberi tanggapan “sangat baik” dan 18 Responden atau 15,93% menyatakan guru yang disertifikasi telah memberikan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.44 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang program Sertifikasi guru mampu memberikan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan baik di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	19	16,81%
2	Baik	21	18,58%
3	Kurang baik	49	43,36%
4	Tidak baik	24	21,24%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.44 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, yakni 19 responden atau 16,81% responden mengatakan “sangat baik” karena menurut responden program sertifikasi guru bisa menjadi solusi dalam peningkatan mutu pendidikan kabupaten Bengkalis, dan 21 responden atau 18,58% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa program sertifikasi guru selama ini bisa menjadi solusi dalam peningkatan mutu pendidikan kabupaten Bengkalis,

Sedangkan 49 responden atau sekitar 43,36% responden menunjukan kategori “kurang Baik” karena program sertifikasi guru kurang bisa menjadi solusi dalam peningkatan mutu pendidikan kabupaten Bengkalis, sisanya 24 responden atau 21,24% responden memberi tanggapan “tidak baik”, karena program sertifikasi guru tidak bisa menjadi solusi dalam peningkatan mutu pendidikan kabupaten Bengkalis

Tabel 5.45 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang para guru dalam jabatan yang belum disertifikasi, apakah mampu memberikan peningkatan mutu pendidikan dengan baik di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	23	20,35%
2	Baik	32	28,32%
3	Kurang baik	27	23,89%
4	Tidak baik	31	27,43%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.45 diatas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “sangat baik”, yakni 23 responden atau 20,35% responden menyatakan bahwa Guru yang belum disertifikasi mampu memberikan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Bengkalis, dan 32 responden atau 28,32% responden memberi tanggapan “baik”.

Sisanya 27 responden atau 23,89% responden memberi tanggapan “kurang baik”, dengan alasan bahwa guru yang belum disertifikasi kurang bisa meningkatkan mutu pendidikan dibandingkan guru yang disertifikasi sedangkan 31 Responden atau 27,43 guru masuk kategori “Tidak baik” karena guru belum disertifikasi belum mampu meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Bengkalis.

Tabel 5.46 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang peningkatan mutu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan kemampuan guru yang di sertifikasi di Kabupaten Bengkalis

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	17	15,04%
2	Baik	11	9,73%
3	Kurang baik	43	38,5%
4	Tidak baik	42	37,17%
Jumlah		113	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel 5.46 di atas, menggambarkan bahwa dari 113 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 43 responden atau sekitar 38,5% responden menyatakan bahwa upaya dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis kurang sesuai dengan kemampuan guru yang sudah disertifikasi dan 42 responden atau sekitar 37,17% responden memberi tanggapan “tidak baik”, dengan alasan upaya dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan kemampuan guru yang sudah disertifikasi

Sedangkan 17 responden atau sekitar 15,04% responden mengatakan “sangat baik” karena upaya dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan kemampuan guru yang sudah disertifikasi. Sisanya 11 responden atau sekitar 9,73% responden memberi tanggapan “baik”, karena upaya dinas pendidikan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan kemampuan guru yang sudah disertifikasi.

Tabel 5.47 Rekapitulasi Penilaian responden tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
Peningkatan Penghasilan						
1	Sertifikasi guru dalam Peningkatan mutu Pendidikan	12	16	49	36	113
2	Upaya yang dilakukan guru yang disertifikasi dalam peningkatan mutu pendidikan	17	18	37	41	113
3	Sertifikasi guru solusi dalam peningkatan mutu pendidikan	19	21	49	24	113
4	Guru yang belum disertifikasi dalam peningkatan mutu pendidikan	23	32	27	31	113
5	Peningkatan mutu pendidikan oleh dinas pendidikan sudah sesuai dengan kemampuan guru yang disertifikasi	17	11	43	42	113
Jumlah		88	98	205	174	565
Persentase		15,56	17,34	36,28	30,79	100

Dari tabel 5.47 hasil rekapitulasi penilaian responden tentang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkalis melihatkan 36,28% responden mengatakan “kurang baik” karena program sertifikasi guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan kurang baik. Hal yang menyebabkan kurang baiknya peningkatan mutu pendidikan terhadap hasil proses sertifikasi guru ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurang baiknya upaya peningkatan mutu

yang dilakukan oleh guru yang sudah disertifikasi, program peningkatan mutu pendidikan oleh Dinas Pendidikan belum sesuai dengan kemampuan guru yang disertifikasi, dan guru yang sudah disertifikasi belum maksimal dalam memberikan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dapat disimpulkan dari hasil rekapitulasi penyebaran kuisioner secara keseluruhan dan hasil observasi di lapangan peran pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis kurang baik dalam peningkatan mutu pendidikan. Pada hal sertifikasi guru diharapkan dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

5.7 Hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil penelitian, tidak tercapainya peranan pelaksanaan sertifikasi guru pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten karena ditemui masih adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya manusia (SDM) Dinas Pendidikan Kabupaten Begkalis belum memenuhi standar yang diharapkan karena masih ada pegawai pelaksana Sertifikasi Guru (PSG) yang berpendidikan Diploma 1 atau setara dengan SMA sederajat..
2. Kurangnya kesadaran dari Dinas Pendidikan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Panitia Sertifikasi Guru (PSG), sehingga mempengaruhi kelancaran proses sertifikasi guru.

3. Pemberian sanksi terhadap guru yang sudah disertifikasi yang tidak maksimal dalam mengajar sehingga program sertifikasi kurang maksimal dirasakan dalam peningkatan mutu Pendidikan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dengan luas wilayah 7.774,33 km² dan secara administratif terdapat 8 kecamatan serta pada seluruh kecamatan tersebut terdapat 102 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 534.417 jiwa yang tersebar pada setiap kecamatan. Setiap kecamatan memiliki keragaman dalam hal perkembangan ekonomi, SDM, sosial dan budaya yang terus berkembang mengikuti perkembangan dan pertumbuhan masyarakatnya. Sejalan dengan semakin meningkatnya usaha-usaha pembangunan pada segala bidang, menuntut tersedianya data yang akurat dan up to date tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan terutama guna menunjang terwujudnya perencanaan yang matang dan tepat serta pengendalian yang cermat dan evaluasi yang kritis khususnya komponen yang berkaitan bidang pendidikan.

Salah satu keberhasilan pembangunan di daerah ditandai dengan menurunnya angka buta huruf atau kebodohan. Kecil atau kurangnya angka buta huruf atau kebodohan yang terdapat pada masyarakat merupakan indikator keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan. Untuk mengangkat komponen-komponen dimaksud menjadi lebih baik pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan program-program antara lain pembebasan biaya pendidikan dari tingkat SD – SLTA, membangun sarana dan prasarana

pendidikan, mengangkat guru-guru honor daerah. Pemaksimalan komponen-komponen tersebut diatas merupakan upaya mewujudkan tujuan pendidikan secara berjenjang yang akhirnya bermuara pada tujuan Pendidikan Nasional yang berbunyi “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, (UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Tempat Pelaksanaan Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Pertanian Kecamatan Bengkalis.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bengkalis



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

4.2 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Visi merupakan gambaran keadaan yang dibayangkan dapat atau ingin dicapai atau diwujudkan pada masa mendatang, merupakan cita-cita yang didukung oleh keadaan sekarang dan merupakan arah bagi pengelolaan lembaga.

Penyertaan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh lembaga dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh lembaga untuk pencapaian visi.

A. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

Adapun Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis 2022 adalah sebagai berikut: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman, Bertaqwa, Berbudaya, Memiliki Keunggulan, Trampil Serta Mampu Bersaing Tahun 2022.

B. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Sejalan dengan pemikiran visi di atas, maka dirumuskan Misi-misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Melaksanakan peluasan dan Pemerataan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
3. Melaksanakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan.
4. Menciptakan relevansi pendidikan dengan dunia usaha (*link in match*)
5. Mengembangkan dan melestarikan budaya daerah pada peserta didik dan masyarakat.

C. Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis antara lain : Untuk mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu dalam upaya membangun manusia dan masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, terampil, bertanggung jawab dan menguasai IPTEK dalam rangka mengembangkan kualitas manusia.

D. Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis antara lain :

1. Penciptaan sistem dan manajemen yang mendorong pelaksanaan otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa depan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
2. Penyediaan lembaga pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di seluruh wilayah dengan kondisi social, ekonomi dan lingkungan daerah setempat secara memadai.
3. Penyediaan sistem pengolahan tenaga pendidikan secara profesional sehingga tersedia guru yang bermutu dan berdidikasi tinggi dalam jumlah yang memadai disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan pula peningkatan kesejahteraan guru.
4. Terwujudnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pendidikan pada berbagai jalur, jenis, dan jenjang

pendidikan sehingga terjalin hubungan antara kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman dengan penyelenggaraan kurikulum pendidikan.

5. Terwujudnya lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan akademis/ profesionalisme anak didik, termasuk anak usia dini.

4.3 Struktur Organisasi Unit Tempat Kerja Penelitian.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pendidikan

H. HERMAN SANI, SH, M.SI

2. Sekretaris Dinas Pendidikan.

Dra. Hj. ERNA SUSILASTUTI, M.Si

Sekretariat dibagi tiga sub bagian:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum : **JUMIHARTO, SH**
- b. Sub Bagian Keuangan : **Hj ITA HERAWATI, SH**
- c. Sub Bagian Program :

3. Bidang Pendidikan Dasar (SD- SMP)

SUPARDI, S.Sos, MH.

Bidang Pendidikan Dasar dibagi tiga Seksi:

- a. Kepala Seksi Bidang Sekolah Dasar

ISPANDI, S.Pd

- b. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama

H DANURI AHMAD, SH.

- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD/SMP

H. KHAIRI FAHRIZAL, ST.

4. Bidang Pendidikan Menengah (SMA)

TUTY AMLIZARTY LAIDA, SP.Msi

Bidang Pendidikan Dasar dibagi tiga Seksi:

- a. Kepala Seksi Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA)

Drs. KAMARUDDIN, M.Pd

- b. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Dra. SITAWATY ARIEF, M.Pd

- c. Kepala Seksi sarana dan Prasarana SMA/SMK

MASADI, S.Sos, M.Si.

5. Bidang Ketenagaan

SYAHRUDIN, S.Si

Bidang Ketenagaan dibagi tiga Seksi:

- a. Kepala Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah dan PLS.

BUSYARIL, S.Pd, M.Pd.

- b. Kepala Seksi Ketenagaan Administrasi.

Dra. SUZIE

- c. Kepala Seksi Ketenagaan Sekolah Dasar.

DONNI SARTIKA, S.Psi

- 6. Bidang pendidikan pra sekolah dan luar sekolah (PLS)

M.TAUFAN, SE.

Bidang PLS dibagi Tiga Seksi:

- a. Kasi Pendidikan Luar Sekolah (TK/PAUD)

SOSI LESTARI, AP.

- b. Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

LINDAWATI, SH.

- c. Kasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Pra Sekolah Serta Luar Sekolah

ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd.

- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.5 Diskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Tempat Penelitian.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang terletak di Jalan Jl. Pertanian Kecamatan Bengkalis ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu untuk membuat tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Dalam susunan organisasinya terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, yang mana membawahi : Sub Bagian Perencanaan dan Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Administrasi Umum. Untuk menjalankan semua kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan dalam hal ini Kepala Dinas dibantu oleh empat bidang yang mana terdiri dari, Bidang Pendidikan Dasar membawahi; Seksi Sekolah Dasar; Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP); Seksi Sarana dan Prasarana SD/SMP. Bidang Pendidikan Menengah membawahi; Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); Seksi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Seksi Sarana dan Prasarana SMA/SMK. Bidang Ketenagaan membawahi; Seksi Pendidikan Dasar (TK, SD, dan SMP); Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah (SMA, SMK, dan PLS). Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah membawahi; Seksi Pendidikan Pra Sekolah (PAUD, TK); Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pra Sekolah dan Luar Sekolah. Dan juga ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional yang turut berperan dalam Dinas Pendidikan tersebut.

Sesuai dengan peraturan diatas diatur juga kedudukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dimana dalam hal ini yaitu :

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendidikan.
2. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis di Bidang Pendidikan.

Tabel 4.1 Penduduk Berumur 7-24 Tahun Keatas Yang Masih Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur

NO	KECAMATAN	KELOMPOK UMUR				JUMLAH
		7-12	13-15	16-18	19-24	
1	Bengkalis	7923	7375	2556	276	18130
2	Bantan	3600	1602	750	81	6033
3	Bukit batu	3564	1389	859	65	5877
4	Siak kecil	2060	629	474	55	3218
5	Rupat	3392	839	869	130	5230
6	Rupat utara	1590	571	141	4	2306
7	Mandau	10085	3222	1120	84	14511
8	Pinggir	27696	8888	8423	396	45403
JUMLAH		59910	24515	15192	1091	100708

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

4.6 Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja Tempat Penelitian

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis.
- b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- c. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2. Sekretariat.

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan administrasi umum.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Dinas Pendidikan.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas- tugas bidang.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program.

Sub bagian perencanaan dan program mempunyai tugas menyiapkan bahan- bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang perencanaan dan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian tugas tersebut sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan.
- 2) Menghimpun data dan mempelajari peraturan perundang- undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan dan program.
- 3) Mencari mengumpulkan, menghimpun, dan mensistемasikan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan dan program sebagai kerangka acuan atau pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- 4) Menginventarisir permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan dan program serta menyiapkan bahan- bahan dalam rangka pemecahaan masalah.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman, dan petunjuk teknis Dinas.
- 6) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

b. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Bagian Administrasi Umum.

3. Bidang Pendidikan Dasar.

4. Bidang Pendidikan Menengah.
5. Bidang Ketenagaan.
6. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Cangara, Hafield. 2001. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta: Bandung.
- Poerwadarminta, Nugroho. 2002. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Pustaka Setia: Bandung.
- Singanimbun, 2001. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES: Jakarta.
- Soeprianto, Jhon. 2002. *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Soerjono, S. 2000. *Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Yamin, Martinis. 2006. *Sertifikasi profesi keguruan di Indonesia*. Gaung Persada Press: Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara

Winardi. 2007. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Kencana: Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. Peraturan Perundangan

Zulkarnain, Rivai. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat*. Adi Cita Karya Nusa: Yogyakarta

Peraturan dan Perundang- Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Tentang *Pengolahan Aset*.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang *Sertifikasi guru*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 pasal 2 ayat 2 bagian 7 dan 8 Tentang *karya Pengembangan dan Keikut sertaan dalam Forum Ilmiah*.

PP No 19 tahun 2005 pasal 42 ayat 1 tentang *sarana dan prasarana Pendidikan*

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen*.

UU RI No.20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*